



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018

INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE



Kementerian PPN/
Bappenas



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



Australian Government

Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago

*Mengapai Inovasi Tata Kelola dalam Era Otonomi Daerah:
Studi terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Pameran Anggaran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah*

Adyawarman

- Kementerian Sekretariat Negara RI
- Mahasiswa S3 Kebijakan Publik, University of Canberra



LATAR BELAKANG

Perbedaan Capaian Daerah di Era Otda

- Positif (*good governance*) vs Negatif (*fraud practice*),
- Inovatif vs Status quo
- Paradoks & Dilema
- PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola di Kab. Batang (2012-2017)

- Habis Gelap (Korupsi), Terbitlah Terang (Transparansi)
- **Pemimpin non-partisan dan keterlibatan Masyarakat Sipil** (Laskar Batang, Omah Tani, Lakpesdam NU, ICW, TII)
- Satu periode saja (sustainability?)



Yoyok Rivo Sudibyo
(Bupati Batang, 2012-2017)

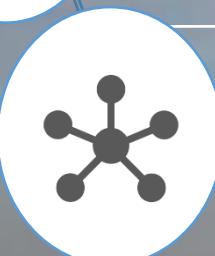


INOVASI DI SEKTOR PUBLIK (vs PRIVAT)



Komponen Utama

- 1) Novelty (Generasi vs Adaptasi)
- 2) Implementasi (Kepemilikan Publik, Difusi)
- 3) Dampak (achieve “More” with “Less”)



Tujuan

- 1) Efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan public
- 2) Demokratisasi (participation and inclusion)
- 3) Legitimasi, legasi, dan reputasi



Dimensi Inovasi (single vs multi-dimension)

- 1) Produk (*service*), 2) Proses (*managerial, technology*),
3) Tata Kelola (*governance*)



Literature Gap terkait Inovasi Governance dalam Sektor Publik
(Hartley, 2005)

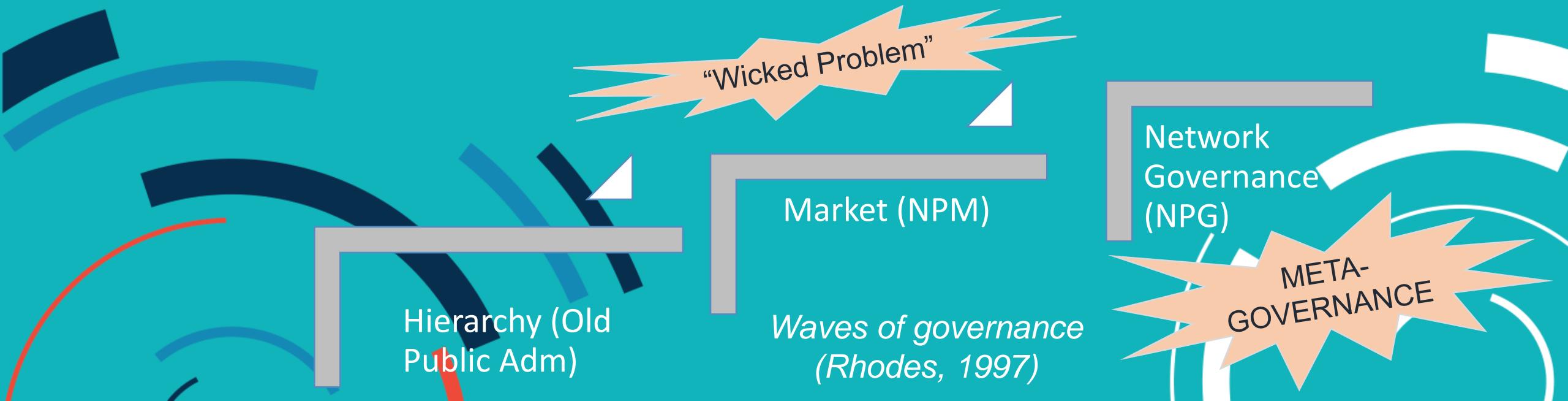
“Service and process innovations are important but insufficient to meet the public values and to generate inclusive growth”

INOVASI TATA KELOLA

(Moore and Hartley, 2008)



1. Sistem produksi berbasis jaringan yang melintas batas organisasi.
2. Menghimpun sumber daya baru (*man, money, material*).
3. Mendefinisikan kembali hak dan tanggung jawab individual.
4. Re-distribusi hak dan kewajiban untuk menentukan dan mengevaluasi nilai serta prioritas dari layanan publik.
5. Mengevaluasi makna keadilan, persamaan, efisiensi dan efektivitas.



INOVASI GOVERNANCE DI KAB. BATANG (2012-2017)

“Birokrasi Bersih, Ekonomi Bangkit”



Co-Creation

INSTITUTIONALISASI
Menpertahankan dan Mengembangkan Inovasi

Co-Controlling

GENERATION
Alasan dan Motivasi di Balik Gagasan

1. Unit Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (UPKP2)
2. Pameran Anggaran

Co-Design

ADOPSI
Meyakinkan Gagasan dan Mendesain Aksi

Co-Production

IMPLEMENTASI
Mewujudkan Ide menjadi Praktek Nyata





Bung Hatta Anti-Corruption Award

DAMPAK INOVASI TATA KELOLA DI KAB. BATANG

1. Peningkatan sumber daya dan kapasitas --> memenuhi aspirasi publik,
2. Mendorong budaya partisipatif untuk mendukung *good governance* (*responsif, pastisipatif, transparan, akuntabel*),
3. Memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi,
4. Meningkatkan kebanggaan aparatur publik --> (budaya perbaikan berkelanjutan),
5. Efek domino untuk mengembangkan inovasi lainnya (one institution, one innovation).



P
E
N
G
H
A
M
B
A
T

Lingkungan politik

- Dukungan dari DPRD, proses penganggaran, serta kendala peraturan

Lingkungan organisasi

- keterbatasan SDM dan keuangan, resistensi birokrasi terhadap resiko, kurangnya insentif inovasi, serta perubahan kepemimpinan

Lingkungan eksternal

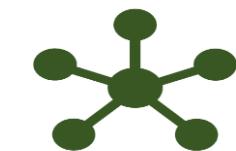
- skeptisme masyarakat, pemberitaan media, dan perbedaan kepentingan dengan pihak eksternal seperti LSM



- ## KUNCI SUKSES INOVASI GOVERNANCE DI KAB. BATANG
1. Konsistensi visi dan tujuan (Birokrasi Bersih, Ekonomi Bangkit),
 2. Membangun kepercayaan untuk bekerjasama (Integritas Kepala Daerah, kemitraan and partisipasi publik),
 3. Mengembangkan akses terhadap sumber eksternal (institusi pemerintah dan masyarakat sipil),
 4. Mengatasi kendala melalui kepemimpinan yang efektif dan berpikir *“out of the box”*,
 5. Orientasi program yang dapat mencapai hasil segera (*quick win*) sebagai landasan solid untuk pengembangan (*scaling up*)

STRATEGI UNTUK MEMPERKUAT INOVASI PUBLIK:

1. *CULTIVATION* (Conducive Climate, Capacity building)
2. *REPLICATION* (Mimicry, Modification, Adjustment)
3. *PARTNERSHIP* (State and non-state actors, Public Social partnership, Public Social Corporate partnership), *for more resources and lively ideas.*
4. *NETWORKING* (Beyond organisation, Learning organisation)
5. *OPEN SOURCE* (Encourage collaboration for new idea and solution)

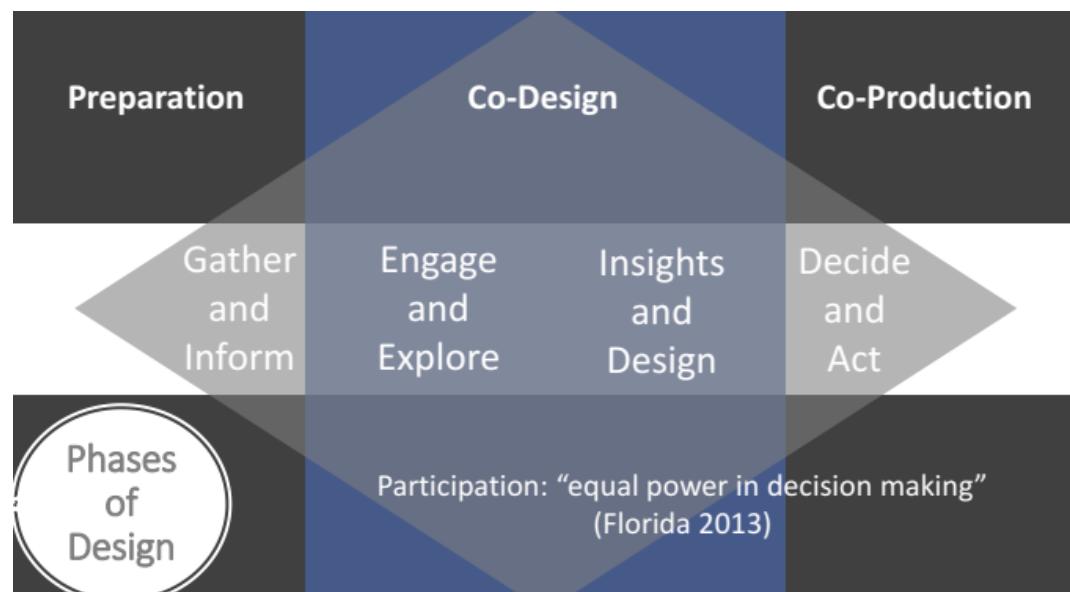


Principles of Collaboration:

1. Inclusive – involves people with lived experience throughout the process
2. Respectful – all participants are equal and all input is valued
3. Iterative – participants involved in testing
4. Participative – empathetic dialogue leading to shared understanding
5. Outcomes focused – directed at achieving a better experience, product or situation that can be evaluated and scaled

Public Leader as a Meta-Governor

1. Convener (create collaboration and embrace multi stake-holders)
2. Mediator (encourage a positive trust-based atmosphere in the collaboration)
3. Catalyst (enhance critical reflectivity and out of the box thinking)





Terima Kasih

adi.adyawarman@canberra.edu.au

Institute for Governance and Public Policy (IGPA), University of Canberra

